

Penanggung Jawab:

José Luís de Oliveira

Redaksi: A. Castro, Nuno Hanjan, A. Neves, N. Katjasungkana, Sebastião da Silva, Octavia do Carmo, Rui Viana, F.X. Sumaryono, E. Saldanha, Nina Marques, Danino da Cunha, Julino Ximenes, Ti, Rogério Soares, José C. Marçal. **Distribusi:** Martinho Viana

Cidadaun

Hamutuk Hari'i Nasaun Demokratiko

Penerbit:

Yayasan HAK

Jl. Gov. Serpa Rosa T-091, Farol, Dili

Tel. + 670 390 313323

Fax. + 670 390 313324

e-mail: direito@yayasanhak.minihub.org

Dengan dukungan:



No. 13, Minggu I, November 2001

F.X. SUMARYONO

• ISI NOMOR INI •



Berita Pemantauan Hal. 3-4



Tatoli Hal. 5

OPINI

José Luís de Oliveira Hal. 2

BERITA PEMANTAUAN

Pemisahan Agama dan Negara Hal. 3

Hearing IMF dan Bank Dunia Hal. 3

Komisi Tematik II Minta Hal. 4

Perpanjangan Hal. 4

Hari Kemerdekaan: CPD-RDTL Hal. 4

Menang Hal. 4

TATOLI

"20 Mei 2002 Mengapa Tidak?" Hal. 5

KONSTITUSI

Partisipasi Politik Hal. 5

Sistem Hukum Eropa Kontinental Hal. 6

Tiga Sistem Pemilu Hal. 6

ADVOKASI

Prinsip-Prinsip Pembangunan Hal. 7

LIAFUAN

Ajakan Kepada Petani Hal. 8

PROFIL

António Ximenes Hal. 8

Dr. Jacob Xavier Hal. 8



Hari Penyerahan Kedaulatan

...

Majelis Konstituante pada sidang hari Jumat (19/10) mengambil keputusan yang sangat penting. Menurut keputusan ini, pada 20 Mei 2002 akan dilakukan "penyerahan kedaulatan" dari Pemerintah Transisi PBB di Timor Lorosae kepada pemerintah Timor Lorosae. Keputusan ini selanjutnya disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, yang akan membahasnya pada sidang bulan November ini. Keputusan akhir berada di tangan Dewan Keamanan, yang memegang kekuasaan tertinggi untuk seluruh proses transisi.

Keputusan tersebut diambil setelah terjadi debat yang tidak konklusif dan akhirnya dilakukan pemungutan suara. Hasilnya, 73 mendukung, 3 menentang, dan 6 abstain. Usulan tanggal hari penyerahan kedaulatan itu diajukan oleh tujuh *bancadas*, yaitu FRETILIN, PD, ASDT, PDC, PNT, PL, dan PPT. Inisiatifnya datang dari FRETILIN, yang mengajak partai-partai lain untuk menandatangani usulan tersebut. Tidak semua partai menerima ajakan ini. Partai yang tidak menandatangani adalah PSD, UDC/PDC, KOTA, dan UDT. Namun, saat sidang João Carrascalão membuat pernyataan dukungan yang cukup mengejutkan, "Kami dari UDT menerima tanggal tersebut sebagai hari penyerahan kedaulatan. Kami menyadari bahwa tanggal tersebut adalah hari lahir ASDT dan sebenarnya UDT yang menolak tanggal tersebut. Tetapi itu sudah berlalu dan kami menerimanya."

Penentang usulan tersebut adalah Mário Carrascalão dan Milena Pires (PSD), Vicente Guterres (UDC/PDC), dan Clementino dos Reis Amaral (KOTA). Mereka beralasan bahwa belum ada kesiapan di pihak rakyat. "Kita jangan terlalu terburu-buru untuk meminta kemerdekaan dan biarkan hal itu dilakukan sendiri oleh PBB sesuai dengan kalender yang telah ditentukannya mengingat secara ekonomi, administrasi, dan pertahanan keamanan kita masih jauh dari siap," kata Mário Carrascalão.

Tentu saja pendapat ini mendapat reaksi yang keras

dari partai-partai lain, yang menyatakan bahwa selama ini tidak ada tanggal yang pasti bagi penyerahan kedaulatan sehingga persiapan ke arah pemerintahan sendiri juga tidak jelas. Feliciano Fátima (ASDT) bahkan mengatakan, "Kita jangan terlalu takut akan keadaan ekonomi sebab rakyat kita sudah lama menunggu kemerdekaan. Kalau tidak punya uang makan ubi kayu pun jadi."

Tanggapan balik yang lebih keras dikemukakan oleh Mário Carrascalão di media. Dalam wawancara dengan *Suara Timor Lorosae* (22/10), ia menuduh partai-partai yang menyetujui dan menandatangani rekomendasi ini bukan karena mempunyai argumentasi yang kuat, tetapi karena "mengikuti saja apa yang diinginkan oleh partai pemenang." Dari tanggapan ini juga terungkap bahwa masalahnya bukan hanya ketidaksiapan, tetapi tanggal itu sendiri. Maklum, 20 Mei (1974) adalah hari lahir ASDT yang kemudian berubah menjadi FRETILIN.

Bekas presiden CNRT, Xanana Gusmão seperti mendukung Mário Carrascalão. Ketika sedang berada di Macau, ia mengatakan keberatan dengan 20 Mei karena tanggal itu condong pada salah satu partai. Ia lebih memilih 5 Mei 2002, karena tanggal itulah yang memungkinkan rakyat Timor bebas dari pendudukan Indonesia. Kendati demikian, Xanana mengatakan dirinya tetap menerima keputusan tersebut karena yang membuat adalah Majelis Konstituante. Selanjutnya, *Suara Timor Lorosae* mengutip kantor berita LUSA (30/10) memberitakan bahwa Xanana mengatakan, "Saya tidak setuju menurut pendapat pribadi saya karena menjadikan suatu hari nasional sangat partisan." Entah siapa yang keliru, keputusan 20 Mei sebagai hari "penyerahan kedaulatan" diberitakan sebagai "hari kemerdekaan" dan menimbulkan reaksi seperti ini. Padahal hari kemerdekaan masih belum diputuskan oleh Majelis sedang Komisi Tematik IV yang bertugas membuat rancangannya telah menetapkan 28 November sebagai hari kemerdekaan. •

Nug Katjasungkana



Mário Carrascalão: "Kita jangan terlalu terburu-buru meminta kemerdekaan..."

Penyerahan Kedaulatan

Majelis Konstituante telah memutuskan bahwa pada 20 Mei tahun depan kedaulatan atas Timor Lorosae yang sekarang dipegang oleh UNTAET diserahkan kepada pemerintah Timor Lorosae. Apa artinya? Sebelum hari itu atau pada hari itu Timor Lorosae sudah harus punya pemerintah sendiri, yakni punya kepala negara, kepala pemerintahan, lengkap dengan kabinetnya. Tentu saja pada hari itu juga sudah ada parlemen nasional, Mahkamah Agung dan badan lain yang ditetapkan oleh konstitusi. Dengan demikian, sebelum tanggal tersebut sudah harus ada pemilihan presiden republik, terlepas dari apakah pemilihannya dilakukan oleh seluruh rakyat atau oleh parlemen.

Keputusan Majelis Konstituante tersebut perlu pengesahan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sesuai Kesepakatan 5 Mei 1999 antara Indonesia, Portugal, dan PBB, jika mayoritas rakyat menolak otonomi luas yang ditawarkan oleh Indonesia, maka Timor Lorosae menjalani transisi di bawah PBB. Nah, badan PBB yang berwewenang menangani transisi adalah Dewan Keamanan. Oleh karena itu keputusan kapan transisi berakhir berada di tangan PBB. Menurut sementara informasi, di Dewan Keamanan sendiri semakin kuat desakan agar Timor Lorosae segera memegang sendiri kedaulatannya. Jadi kemungkinan besar keputusan Majelis Konstituante akan disetujui oleh Dewan Keamanan.

Di Timor Lorosae sendiri ada yang tidak setuju tanggal penyerahan kedaulatan tersebut. Misalnya ada yang mengatakan bahwa tanggal itu terlalu cepat karena Timor Lorosae secara ekonomi, administrasi, dan pertahanan masih jauh dari siap untuk memerintah diri-sendiri.

Pendapat ini perlu kita cermati. Benar bahwa dalam banyak hal persiapan untuk berdirinya negara merdeka Timor Lorosae memang tidak baik. Misalnya saja, sampai sekarang belum ada kebijakan yang jelas mengenai pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi belum ada, dan pendidikan sekolah masih melanjutkan sistem Indonesia, dengan perubahan tambal-sulam yang tergantung pada kreativitas para guru. Kalau kita perhatikan, banyak sekolah bisa berjalan hanya karena "kenekatan" para guru. Di bidang pertanian, belum satu saluran irigasi pun dibangun oleh UNTAET. Padahal salah satu kewajiban UNTAET, seperti disebutkan oleh Resolusi 1272 Dewan Keamanan PBB (Oktober 1999) adalah "menyediakan kondisi bagi pembangunan berkelanjutan." Bagaimana terjadi pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian jika tidak ada irigasi yang dibangun?

Dengan kata lain, ketidaksiapan tersebut lebih banyak karena ketidaksiapan UNTAET menjalankan kewajibannya mempersiapkan kemerdekaan Timor Lorosae. Hal seperti ini yang disadari oleh para pemimpin politik Timor Lorosae pada tahun lalu dan mendorong CNRT untuk mengajukan agenda politik, yang antara lain menetapkan tanggal pemilu Majelis Konstituante. Pada tahun lalu memang sangat terasa bahwa rakyat semakin kecewa dengan berlangsungnya transisi yang tidak seperti mereka bayangkan. Banyak persoalan yang muncul tidak ditangani dengan baik. Sementara CNRT dan pemimpinnya tidak diberi kedudukan sebagai mitra dalam transisi, justru dijadikan penonton saja. Padahal, karena besarnya partisipasi rakyat, mereka mengenal betul masalah-masalah rakyat Timor Lorosae. Semua wewenang ada pada UNTAET, padahal UNTAET sangat tidak mengerti keadaan. Karena itulah, lebih baik jika masa transisi yang tidak menentu ini segera diakhiri, agar persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat bisa ditangani oleh orang Timor Lorosae sendiri.

Tidaklah berlebihan kalau bekas penanggungjawab Frete Política Interna (FPI) David Ximenes mengatakan bahwa kalangan perlawanan siap untuk menjalankan pemerintahan Timor Lorosae. Ia benar, kemerdekaan adalah soal prinsip bukan masalah teknis. Menganggap rakyat Timor Lorosae tidak siap memerintah diri sendiri bukanlah sikap pejuang kemerdekaan, tetapi sikap kolonial yang selalu memandang rendah rakyat yang dikuasai. Cidadaun

• Pffu iiii! •

Xanana Gusmão pergi ke Macau untuk meminta kalangan pengusaha di sana menanamkan modalnya di Timor Lorosae.

Konstitusi yang menjadi dasar dari strategi pembangunan nasional belum selesai disusun, kok sudah mengundang investor ...

Kerja Komisi Tematik II terhambat lambannya penerjemahan dari bahasa Portugis ke bahasa Indonesia.
Hambatan teknis kok terus bertambah ya ...



Kapan Kita Merdeka?

• José Luís de Oliveira •

Pada tanggal 19 Oktober 2001 Majelis Konstituante telah memutuskan 20 Mei 2002 sebagai tanggal perpindahan kedaulatan (*transfer of sovereignty*) dari UNTAET ke Pemerintah Timor Lorosae. Keputusan tersebut memunculkan polemik di media, mulai dari yang mendukung hingga yang menentang. "Genderang" polemik yang dimulai dari Gedung Majelis Konstituante bergema hingga ke luar negeri. Dari Macau, Xanana Gusmão yang sedang mengadakan kunjungan untuk mencari dukungan bagi pembangunan Timor Lorosae pun tak ketinggalan memberi komentar yang kontroversial.

Kesan yang muncul dari "pertentangan" ini nampak seperti para pimpinan politik kita sedang memperebutkan tanggal kemerdekaan. Argumentasi dari masing-masing pihak seolah-olah menghendaki adanya pengakuan terhadap jasa tertentu yang dinyatakan dengan tanggal kemerdekaan.

Kesekian kali lagi bangsa Timor Lorosae dijebak untuk memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Perdebatan itu telah membuat hal-hal yang lebih penting untuk membangun sebuah negara merdeka dilewatkan. Seharusnya kita tidak perlu berdebat panjang tentang tanggal kemerdekaan. Perdebatan penting sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan kondisi yang memungkinkan negara-bangsa kita hidup merdeka yang sesungguhnya. Apakah artinya kalau kita peringati sebuah hari kemerdekaan dengan berpesta-pora, tetapi

harganya jasa bangsa Timor Lorosae untuk memerdekakan diri. "Jasa" PBB ini seharusnya dilihat sebagai wujud dari tanggungjawab dan kewajiban dunia internasional terhadap hak bangsa Timor Lorosae untuk menentukan nasib sendiri, yang selama lebih dari 20 tahun telah mereka abaikan.

Tanggal 5 Mei atau 30 Agustus tetap kita catat sebagai hari penting dalam sejarah Timor Lorosae, tetapi bukan dihargai sebagai hari kemerdekaan Timor Lorosae. Karena kemerdekaan negara-bangsa Timor Lorosae bukan bagaikan bayi yang dilahirkan oleh PBB, sebagaimana dinyatakan oleh pimpinan UNTAET Sergio de Mello pada wawancara dengan televisi BBC (30/8), tetapi adalah perjuangan ratusan tahun rakyat-bangsa Timor Lorosae.

Memang zaman telah berubah dan keadaan pun telah berubah. Oleh sebab itu visi tentang kemerdekaan pun harus menyesuaikan dengan keadaan. Dulu kita berteriak merdeka sebagai wujud menentang penjajahan dan pendudukan. Tetapi sekarang kalau kita berteriak merdeka seharusnya ujudnya adalah memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan terhadap salah satu golongan dalam bangsa kita. Hal-hal seperti inilah yang merupakan persoalan yang membelunggu kemerdekaan bangsa kita sekarang. Karena itu semua pihak harus memberikan perhatiannya, bukan memperdebatkan sebuah seremonial yang menjadi urusan PBB. UNTAET hadir di sini untuk sebuah tugas yang telah dimandatkan, bila tugas itu

Apa artinya kita peringati hari kemerdekaan dengan berpesta-pora, tetapi kehidupan bangsa ini masih tergantung pada orang lain?

segala kehidupan negara-bangsa ini masih tergantung kepada orang lain. Kita bisa punya pemerintahan sendiri, tetapi kekuasaan tetap pada pihak lain.

Sesungguhnya sejarah Timor Lorosae telah menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa keinginan untuk merdeka telah ada semenjak penguasa kolonial menginjakkan kakinya pertama kali di Timor Lorosae. Berbagai pemberontakan yang terjadi pada zaman kolonial Portugis membuktikan bahwa rakyat Timor Lorosae tidak ingin dijajah oleh bangsa lain. Dalam proses sejarah selanjutnya, semangat kemerdekaan ini kemudian dipertegas lagi dengan proklamasi kemerdekaan 28 November 1975. Walaupun proklamasi ini dinyatakan secara unilateral oleh FRETILIN, tetapi apa yang diproklamasikan merupakan semangat atau keinginan seluruh rakyat Timor Lorosae.

Sejarah adalah sebuah realitas yang tidak mungkin diubah. Bila dalam perkembangannya kemudian ada sebuah realitas baru di mana pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) datang "membebaskan" bangsa Timor Lorosae dari pendudukan militer Indonesia, ini juga tidak bisa kita pungkiri dan harus dihargai pula. Tetapi penghargaan pada "jasa" PBB bukannya kemudian harus membalikkan sejarah dengan tidak di-

telah diselesaikan, kekuasaan memang harus diserahkan kepada bangsa kita. Sekarang terkesan bahwa seolah-olah UNTAET sedang didesak untuk "keluar" dari sini. Dan ini adalah jebakan UNTAET untuk mengalihkan persoalan sebenarnya, yaitu seberapa jauh UNTAET mampu menyelesaikan mandatnya.

Jadi, kiranya kita semua sadar bahwa persoalan penting sekarang adalah bagaimana mengisi *libertação da pátria* yang telah dicapai dengan program untuk *libertação do povo*. Penting dibicarakan sekarang adalah bagaimana membangun sebuah sistem ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan maupun pemerintahan yang memungkinkan rakyat hidup merdeka, dan bukannya rakyat hidup terbebani oleh hutang-hutang. Kehidupan negara-bangsa ini yang hampir semuanya masih tergantung pada bantuan dari luar, dan malah banyak bantuan yang tidak jelas pemanfaatannya, seharusnya menjadi sebuah agenda penting yang harus diperdebatkan. Bukannya mengemis lagi ke luar negeri tanpa membereskan dulu persoalan di dalam, yang justru nanti hanya akan menambah beban saja bagi anak-cucu kita. •

José Luís de Oliveira adalah Wakil Direktur Yayasan HAK dan anggota Dewan Pengurus Forum Nasional NGO Timor Lorosae (FONGTIL).

Pemisahan Agama Dengan Negara

Tiga tokoh agama berbicara mengenai hubungan negara dan agama. Ada yang meminta hati-hati dengan pemisahan keduanya, ada yang mengusulkan jaminan non-diskriminasi.

• • •

Komisi Tematik IV pada Sabtu (27/10) mengadakan beberapa dengar pendapat mengenai hubungan negara dengan agama. Sejumlah tokoh agama diundang untuk memberikan pendapatnya. Mereka adalah Vikaris Jenderal Keuskupan Dili Pe. José António da Costa (menggantikan Uskup Dili Mgr. Carlos Belo yang sedang berkunjung ke luar negeri) dari agama Katolik, Pendeta Francisco Vasconcelos tokoh agama Kristen Protestan, dan Imam Muslim sebagai wakil umat Islam Timor Lorosae.

Pe. José António da Costa berpendapat bahwa dalam membangun negara baru Timor Lorosae harus ada dasar hukum atau konstitusi yang di dalamnya menetapkan pemisahan antara kekuasaan pemerintah dan agama. Tetapi, dalam membuat pemisahan ini beberapa hal menurutnya harus diperhatikan. Gereja dan pemerintah sama-sama melayani rakyat yang sama di Timor Lorosae. Pemisahan itu, katanya lagi,

juga harus berdasarkan perjuangan semua pihak selama ini. Yang dimaksudkan olehnya tentu adalah peran Gereja Katolik dalam perjuangan, yang memang banyak membantu para gerilyawan maupun aktivis *clandestina*. "Jadi kita harus jeli dan jelas dalam memutuskan pemisahan antara keduanya."

Pendapat Pe. José António da Costa itu seolah didukung oleh Pendeta Francisco Vasconcelos. Sebelumnya ia mengatakan bahwa ia lebih suka menyoroti hubungan negara dengan agama, bukan hanya hubungan negara dengan Gereja, karena di Timor Lorosae umat beragama itu tidak hanya Kristen. Menurutnya, di dunia ini agama berbicara tentang kehidupan rohani dan negara atau pemerintah berbicara tentang kehidupan jasmani, yang keduanya jalan bersama-sama. "Kita semua tahu dan mengakui negara kita ini berdasarkan agama, tetapi kita harus melakukan pemisahan kekuasaan antara agama dan pemerintah. Masalahnya adalah kita ha-



Imam Muslim dan Francisco Vasconcelos (kedua dan ketiga dari kiri) bersama para deputados.

• • •

rus melakukan pemisahan yang bagaimana dan sampai sejauh mana pemisahan itu atau bagian mana yang harus dipisahkan dari pemerintah. Sebab secara realitas pemerintah melayani rakyat dan agama juga untuk melayani rakyat," ungkapnya. Menurutnya, kita lebih dulu harus mengetahui pengertian agama yang merupakan suatu faktor kehidupan moral sosial masyarakat dan lembaga pendidikan moral yang memperkuat kehidupan moral masyarakat dalam negara. "Dari sini kita harus tegas membatasi institusi dan kekuasaan antara pemerintah dan agama dengan batasan-batasan yang jelas sehingga tidak

menjadi bumerang bagi kita sendiri dalam pelaksanaannya," katanya.

Imam Muslim berbicara singkat saja. Menurutnya pendapatnya sama dengan yang diungkapkan Pendeta Vasconcelos. Ia lebih menekankan perlunya negara menjamin kebebasan beragama dan menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap umat beragama. "Dalam konstitusi harus dijamin hak yang sama bagi semua orang tanpa memandang agama yang dianutnya dan pemerintah harus mampu menghimpun aspirasi religius yang ada di Timor Lorosae," katanya. •

Rogério Soares dan NK

Sistem Perekonomian Tidak Perlu Masuk Konstitusi

Konstitusi tidak perlu mencantumkan tentang sistem perekonomian, karena ini terlalu spesifik.

• • •

Konstitusi harus berlaku untuk waktu yang lama, karena itu konstitusi tidak perlu mengatur hal-hal yang spesifik seperti mengenai sistem ekonomi. Demikian dikatakan oleh Wakil Bank Dunia di Timor Lorosae Sarah Cliffe dalam dengar pendapat dengan Komisi Tematik III Majelis Konstituante pada hari Jumat (26/10). Dengar pendapat ini juga menampilkan Jan van Houten dari IMF dan Robert Boumphrey dari Bank Pembangunan Asia.

Menurut Cliffe, sebaiknya konstitusi tidak berbicara mengenai sistem perekonomian pasar bebas, sistem perekonomian campuran, atau model sosialis. Hal-hal seperti ini adalah program partai-partai dalam persaingan pemilu, yang akan dijalankan ketika partai bersangkutan memerintah. Mereka harus memilih kebijakan perekonomian sesuai dengan program masing-masing, ada yang cenderung pada pasar bebas dan ada yang cenderung pada perekonomian campuran.

Dalam dengar pendapat tersebut,

Cliffe juga berbicara mengenai hak dasar, hak positif, dan lembaga serta proses yang berhubungan dengan anggaran dan keuangan negara. Menurutnya, tiga hal tersebut berhubungan dengan pengembangan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebelumnya, wakil IMF Jan van Houten yang berbicara mengenai sistem moneter juga mengatakan bahwa konstitusi harus membatasi pada prinsip yang luas tidak sampai rinci. Ia memberi contoh konstitusi Portugal yang hanya memiliki satu kalimat mengenai hal ini, yaitu "Bank Portugal adalah otoritas moneter dan akan bekerja sesuai dengan undang-undang." Jadi konstitusi tidak mengatur bekerjanya bank sentral. Yang mengaturnya adalah sebuah undang-undang organik. Berbeda dengan Portugal, dalam konstitusi Brazil sistem finansial diuraikan dalam tiga halaman. "Tetapi kalau kita baca dengan teliti, tetap dibutuhkan undang-undang khusus mengenai hal ini," katanya.

Praktek yang baik adalah konstitusi menetapkan bahwa pengumpulan pa-



Wakil Bank Dunia Sarah Cliffe (kedua dari kanan) dalam dengar pendapat Komisi III.

• • •

jak dan penggunaannya serta pembebanan dana publik harus diatur oleh undang-undang. "Tetapi konstitusi tidak menyebutkan kapan dan bagaimana, hanya cukup menyebutkan bahwa diatur oleh undang-undang" tegasnya. Mengenai sistem fiskal, yang kadang juga disebut sistem finansial, konstitusi cukup menyebutkan tentang otoritas moneter pusat, yang namanya bisa bank sentral atau otoritas fiskal. Bekerjanya badan ini juga diatur undang-undang, bukan konstitusi.

Ketika ditanya oleh *deputado* Francisco Jeronimo, sistem moneter apa yang baik untuk Timor Lorosae dibentuk bank sentral, van Houten menjawab bahwa tidak ada sistem moneter yang ideal dan tidak ada regulasi yang

ideal. "Semua tergantung pada kekuatan ekonomi negeri yang bersangkutan dalam perekonomian dunia. Yang paling kuat ekonominya akan paling independen di bidang moneter," katanya. Semuanya berubah karena kekuatan ekonomi berubah seiring dengan lingkungan yang selalu berubah. Negara yang ekonominya, secara keuangan dan nilai mata uangnya akan lemah.

Pendapat dua orang itu perlu kita cermati dengan hati-hati. Kalau konstitusi hanya menyebutkan secara umum saja hal yang sangat penting itu, maka terbuka kemungkinan bahwa kekuatan ekonomi yang besar yang akan menentukan ketentuan-ketentuan rinci yang mengaturnya. •

NK (laporan Nina M & Danino C)

Komisi Tematik II Minta Perpanjangan Waktu

Banyak isi konstitusi yang menjadi tugas Komisi Tematik II yang belum dibahas. Komisi ini meminta perpanjangan waktu.

• • •

Komisi Tematik II ini boleh dibilang komisi yang paling berat dan membutuhkan konsentrasi penuh dalam menyusun rancangan konstitusi. Komisi yang bertugas membahas organ negara dan organisasi kekuasaan politik ini pada 25 Oktober sudah menyelesaikan satu bab khusus tentang prinsip umum dasar-dasar pemerintahan. Sekarang tengah menggarap kompetensi institusi pemerintah pusat, seperti kepala negara, pemerintah, kabinet, parlemen nasional, dan badan peradilan, serta status partai-partai politik. Sementara hirarki kekuasaan yang dianggap sangat penting, saat ini masih ditunda pembahasannya. Menurut Ketua Komisi II Jacob Fernandes (FRETILIN), pembahasan mengenai hal ini akan ditentukan setelah selesainya pembahasan kompetensi institusi pemerintah pusat.

Dalam hal partai politik, komisi ini telah memberi rekomendasi tentang hak partai kecil atau partai oposisi un-

tuk mengakses informasi pemerintah. Referendum sebagai suatu bentuk pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatoris juga telah dibahas. Komisi berpendapat bahwa referendum diadakan bila ada kepentingan nasional yang membutuhkannya dan perlu ditetapkan jumlah syarat diadakannya referendum, termasuk jumlah minimum orang yang mendukung diadakannya referendum. Pasal rancangan konstitusi mengenai hal ini sekarang sedang disusun.

Kekuasaan pemimpin lokal atas administrasi pemerintah lokal juga diangkat dalam pembahasan komisi. Pemegang kekuasaan tradisional (*autoridade locais*) akan dimasukkan ke administrasi pemerintah lokal (semacam pemerintah daerah pada zaman Indonesia) dalam sistem pemerintahan. Namun hal ini masih akan dibahas lebih lanjut. "Karena kita harus mendefinisikan siapa yang merupakan pemegang kekuasaan tradisional. Ini yang menjadi masa-

lah," kata Ketua Komisi II kepada *Cidadaun*. "Pemegang kekuasaan tradisional adalah para *liurai* yang asli dari segi keturunan dan sejarah. Tetapi kenyataan sekarang ini sudah menjadi kabur. Ini perlu dilihat secara jelas, jangan sampai kita mengesahkan ini, tetapi muncul orang-orang oportunistis yang memanfaatkan keadaan. Untuk itu perlu penelitian jika hal ini dimasukkan dalam konstitusi," katanya melanjutkan.

Dalam sidang 26 Oktober, komisi ini memutuskan digunakannya nama "Parlemen Nasional" sebagai nama badan legislatif atau dewan perwakilan rakyat Timor Lorosae. Yang mengusulkan nama ini adalah FRETILIN dan beberapa partai lainnya. Usulan lain untuk nama badan ini adalah Assembleia Nasional (disampaikan oleh Milena Pires dari PSD). Menurut Ketua Komisi II kedua nama tersebut sama pengertiannya, hanya tergantung pada selera masing-masing untuk menggunakannya. Dalam pemungutan suara Komisi II, dari 21 anggota yang hadir, 18 suara menyetujui, satu menentang, dan dua abstain.

Dalam diskusi mengenai definisi dan fungsi Parlemen Nasional, FRETILIN dan UDT sependapat bahwa definisi dan fungsi harus dilihat secara terpisah. Sementara Vicente Guterres (UDC/PDC) dan Milena Pires (PSD) berpendapat tidak boleh dipisahkan, dalam arti definisi parlemen ditulis bersama dengan fungsi parlemen. Pada pemungutan

an suara, usulan UDC dan PSD gugur. Masalah yang membuat pertentangan adalah masalah *fiscalizadora* (kontrol). Menurut FRETILIN, fungsi kontrol parlemen sudah diatur dalam pasal terpisah. Tetapi UDT berpendapat bahwa *fiscalizadora* hanya merupakan satu unsur dari tugas parlemen, sedangkan tugas pokoknya adalah tugas legislatif. Menurut Jaco Fernandes, *fiscalizadora* bisa dilakukan oleh organ independen lain, seperti pengadilan. Mengenai definisi Parlemen Nasional, Majelis memutuskan mengadopsi João Carrascalão, bahwa Parlemen Nasional adalah badan perwakilan seluruh rakyat Timor Lorosae yang merupakan lembaga tertinggi dalam Republik. Usulan ini lolos dengan 12 suara setuju, empat kontra, dan dua abstain.

Kendati waktu 10 hari telah habis Komisi II belum berhasil menyelesaikan semua tugasnya. António Ximenes (PDC), salah seorang anggota komisi, kepada *Cidadaun* mengatakan bahwa ini disebabkan masalah yang dibahas komisi ini memang kompleks. "Selain itu, sekretariat sangat lambat membuat terjemahan bahan yang dibahas. Kami lalu membentuk tim kecil untuk menerjemahkan secara langsung, yang terdiri dari José Manuel, António Cardoso, dan Januario Soares, Mário Carrascalão, dan saya sendiri. Hal ketiga adalah teknis, seperti listrik sering padam dan mikrofon yang tidak berfungsi," katanya. • José Marçal

Hari Kemerdekaan: CPD-RDTL Menang

Kendati organisasinya dulu menolak pemilihan umum, Cristiano da Costa (CPD-RDTL) diundang untuk berbicara mengenai hari kemerdekaan.

• • •

Kemerdekaan dan bendera nasional Timor Lorosae menjadi wewenang Komisi Tematik IV untuk merancang dalam konstitusi. Dalam rangka itu, pada 27 Oktober komisi ini mengundang Cristiano da Costa dari Comissão Popular para Defesa da República Democrática de Timor Leste (CPD-RDTL).

Cristiano yang mengatakan datang ke Majelis Konstituante sebagai pribadi ini, berpendapat bahwa bendera Republik Demokratik Timor Leste (RD-TL) yang dikibarkan pada saat proklamasi 28 November 1975 harus tetap dipertahankan sebagai bendera nasional. Bendera ini adalah bagian dari sejarah perjuangan dan pengorbanan rakyat. Kita harus menghargai kebenaran sejarah bahwa rakyat dengan pimpinan FRETILIN memperjuangkan dan memproklamasikan kemerdekaan dengan bendera itu. "Inilah kebenaran sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapa pun," katanya. Dari logika politik, menurutnya, FRETILIN yang memimpin

perjuangan kemerdekaan tanpa terputus punya hak politik untuk merestorasi kemerdekaan 28 November 1975.

Tanggal 28 November harus tetap dijadikan hari kemerdekaan. "Dalam menyusun konstitusi, Majelis Konstituante harus berdasarkan realitas perjuangan politik rakyat Timor Lorosae. Kemerdekaan RDTL yang diproklamasikan pada 28 November 1975 harus direstorasi," katanya menegaskan. Menurutnya, memang proklamasi kemerdekaan itu bersifat unilateral (sepihak). Sehingga salah satu syarat untuk berdirinya negara, yaitu pengakuan internasional, belum terpenuhi. Dan oleh sebab itu negara RDTL tidak memiliki kedaulatan karena saat itu tidak terjadi penyerahan kedaulatan (*transferir de soberania*). Tetapi, kemerdekaan negara-negara lain yang dulunya dijajah bangsa asing juga demikian. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945 adalah proklamasi sepihak. Dunia internasional baru mengakui setelah terjadi penyerahan kedaulatan pada 1949. "Tugas Majelis Konstituante sekarang



Cristiano da Costa di pintu keluar Majelis Konstituante.

• • •

adalah mendapatkan kedaulatan dan pengakuan internasional pada kemerdekaan 28 November 1975," katanya.

Ketika Jacob Xavier dari PPT menanyakan apakah PBB akan menerima kalau Majelis Konstituante menuliskan RDTL dalam konstitusi, Cristiano menjawab bahwa masalahnya adalah bagaimana kita mengakui semua perjuangan kita. "Kalau kita bersama-sama mengakuinya, maka orang lain pasti juga mengakuinya," katanya.

Ketika setelah dengar pendapat, *Cidadaun* menanyakan bagaimana dengan tanggal 30 Agustus yang oleh pihak tertentu diusulkan sebagai hari kemerdekaan, Cristiano menjawab, "Tanggal 30 Agustus itu bisa kita pe-

ringati sebagai hari nasional. Tetapi hari kemerdekaan tetap 28 November." Ia optimis mengenai penetapan tanggal ini. Menurutnya CPD-RDTL yang berjuang untuk hak bangsa dan negara Timor Lorosae menolak pemilu UNTA-ET karena bagi organisasi ini yang pertama-tama harus dilakukan adalah pengakuan RDTL. Tetapi sekarang FRETILIN, ASDT, dan PNT di Majelis Konstituante mau merestorasi RDTL. "CPD-RDTL *win without fighting* [menang tanpa berperang, *Red.*]. FRETILIN menang 55 kursi, ASDT enam. Mereka harus memperjuangkan restorasi RDTL karena terikat padanya," katanya dengan tersenyum. •

Rogério Soares dan NK